



**PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH YOGYAKARTA)**

Agus Santosa*

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
agssjogja@gmail.com

INFO ARTIKEL

Buletin Ekonomi
Volume 19
Nomor 1
Halaman 1-120
P-ISSN: 1410-2293
e-ISSN: 2714-6871

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:
30 Januari 2021
Tanggal Revisi:
30 Maret 2021
Tanggal Diterima:
30 April 2021

Kata Kunci:

pembukuan, inventarisasi,
pelaporan, penerapan
SIMAKBMN, kualitas laporan
keuangan



Abstrak: Pengaruh Penatausahaan Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penatausahaan dan penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perguruan tinggi negeri, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian dilakukan di 3 satuan kerja sebagai entitas Kemendikbudristek, menggunakan data primer (kuesioner), data sekunder Laporan Neraca Keuangan Tahun 2018 s.d. 2020 Audited di perguruan tinggi negeri di wilayah Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 pegawai akuntansi aset dan akuntansi keuangan dari 3 satuan kerja. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 23 dengan variabel independen adalah pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Abstract: The Effect of Administration and Implementation of State Property Accounting Management Information System (See Bmn) on the Quality of Financial Reports (Case Study in State Universities Work Units Yogyakarta Region).

The Effect of Administration and Application of State Property Accounting Management Information System (SIMAK BMN) on the Quality of Financial Reports (Case Study in the Work Unit of State Universities in Yogyakarta Region). The purpose of this research is to analyze the effect of administration and application SIMAK BMN on the quality of financial reports in work units of state universities, either simultaneously or partially. The research was conducted in 3 work units as Kemendikbudristek entities, by used primary data (questionnaires), secondary data from 2018 to 2020 Audited Financial Reports at State Universities in the Yogyakarta area. The sample in this research were 45 employees of asset accounting and financial accounting from 3 work units. This research used multiple linear regression analysis model with SPSS 23 software with independent variables are bookkeeping, inventory, reporting, application of SIMAK BMN, and the dependent variable is the quality of financial reports. The results of the research prove that bookkeeping, inventory, reporting, and the application of SIMAK BMN simultaneously affect to the quality of financial reports. Partially it was found that bookkeeping, inventory, reporting, and application of SIMAK BMN had a significant positive effect to the quality of financial reports.

Keywords: *bookkeeping, inventory, reporting, application of SIMAKBMN, quality of financial reports.*

Disitasi sebagai: .

Surel:

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang Keuangan Negara ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan pemerintah, adapun salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual selanjutnya dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang lebih baik dari periode sebelumnya, ditandai dengan indikator opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP misal, dari opini WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu cara untuk mewujudkan opini WTP dapat dipertahankan adalah dengan penerapan SIMAK BMN dan penatausahaan barang milik negara (BMN) dengan benar. Mengingat data pengelolaan barang keuangan milik negara (BMN) erat kaitannya dengan laporan keuangan karena dalam laporan keuangan disajikan juga laporan BMN (Novira, dkk.2017).

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan dan penatausahaan BMN menjadi

semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien maka diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) untuk membantu mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi dalam penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (PMK No.233/PMK.05/2007:Pasal 1 ayat 23). Dalam penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN) pada satuan kerja (satker) perguruan tinggi negeri wilayah Yogyakarta sebagai objek penelitian dalam laporan BMN di Neraca periode Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020 Audited tercatat sangat besar nilai netto sebesar Rp8.385.579.899.100,- sebagaimana dalam rincian pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (AUDITED)				
UAKPB : PTN-BLU dan PTN-Satker Kemendikbudristek Wilayah Yogyakarta				
AKUN	URAIAN AKUN NERACA	Netto 2018	Netto 2019	Netto 2020
117111	Persediaan	15.812.004.078	13.566.493.456	28.446.480.462
131111	Tanah	4.467.089.018.859	4.586.385.509.859	6.502.537.023.509
132111	Peralatan dan Mesin	165.977.118.104	126.519.270.038	217.819.131.266
133111	Gedung dan Bangunan	825.247.231.247	879.861.231.179	1.248.252.012.525
134111	Jalan dan Jembatan	549.496.466	1.134.928.680	293.257.888
134112	Irigasi	2.205.831.915	2.437.890.010	2.003.151.469
134113	Jaringan	9.222.201.146	9.583.222.990	9.000.448.011
135121	Aset Tetap Lainnya	55.544.853.698	52.437.523.114	61.855.985.277
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	147.854.459.001	115.500.636.701	149.692.804.401
162151	Software	2.126.787.100	4.398.769.940	3.062.646.698
62161	Lisensi	140.702.414.191	163.820.330.057	117.584.498.325
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	45.521.033.304	46.519.989.476	44.638.560.269
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	146.894.000	146.894.000	393.899.000
JUMLAH KESELURUHAN AKUN ASET DI NERACA		5.877.999.343.109	6.002.312.689.500	8.385.579.899.100
JUMLAH PERTUMBUHAN (+/-) ASET BMN DI NERACA		4%	2%	40%

Sumber Tabel 1: Data sekunder SIMAK BMN dan e-Rekon/LK Kemenkeu atas Laporan Keuangan/BMN 2018-2020

Persediaan terdiri dari, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, ATB serta Aset Tetap Lainnya, dimana dalam tatakelolanya masih ditemukan hasil pemeriksaan catatan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) pencatatan pada aplikasi SIMAK belum sesuai dengan prinsip yang seharusnya dijalankan, dimana data yang ada dalam SIMAK BMN tidak update dengan penanggungjawab keuangan dimasing-masing Subbag/Unit/Satker, perekaman barang yang ada di daftar barang keuangan tidak update di SIMAK BMN, dokumen kepemilikan belum tertib, selain itu banyak barang rusak seperti peralatan dan mesin yang belum diusulkan penghapusan, sehingga menyebabkan data BMN real tidak sesuai dengan laporan, meskipun nilai neraca menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun mulai 4% s.d. 40%

Salah satu masalah utama pengelolaan barang milik negara di satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta adalah belum optimalnya kesadaran SDM dalam penertiban penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian pengelolaan aset negara/BMN bukanlah pekerjaan yang mudah.

Menurut Doli D. Siregar (2004:519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan mencari solusi permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset karena setiap aset yang dimiliki negara harus jelas status kepemilikannya, untuk mencegah potensi sengketa ataupun penyerobotan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil aset milik negara.

Menurut Amiri Kartika (2015:33) permasalahan klasik yang sering timbul di lapangan seperti manajemen sumber daya manusia terhadap ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan aset yang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara terhadap laporan keuangan satuan kerja perguruan tinggi negeri setiap tahun masih terdapat catatan temuan berulang masalah pengelolaan BMN.

Penerapan SIMAK BMN dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di lihat dari hasil penelitian (Nasrudin 2015) yang mengatakan bahwa dalam penerapan Sistem Informasi

Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dengan benar dan optimal dapat menghasilkan kualitas informasi BMN yang digunakan oleh suatu entitas akuntansi barang, sehingga dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan, hal ini terbukti dengan adanya kemajuan opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK. Status Opini WTP dapat dipertahankan oleh kementerian/lembaga, yang secara langsung merupakan peran dari penerapan SIMAK-BMN dalam menyajikan laporan barang milik negara.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta fenomena yang terjadi di satuan kerja perguruan tinggi negeri Kemendikbudristek wilayah Yogyakarta mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait "Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Wilayah Yogyakarta". Dalam penelitian ini menggunakan 4 Variabel Independen yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerapan SIMAK BMN dan 1 Variabel Dependen yakni Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, populasi, serta memperluas sampel penelitian dengan menggunakan seluruh sebaran kuesioner pegawai yang selama ini menangani akuntansi aset BMN dan akuntansi keuangan di satuan kerja. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Apakah Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? Dan
4. Apakah Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Untuk mengetahui Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Untuk mengetahui Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan
4. Untuk mengetahui Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perguruan tinggi negeri di wilayah Yogyakarta.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat prasyarat normatif yang diperlukan yaitu : (i) relevan, memiliki manfaat umpan balik, tepat waktu, dan lengkap; (ii) andal, penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas; (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama; dan (iv) dapat dipahami, informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015:11), basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal yang sama dapat ditegaskan oleh Van Der Hoek (2005), penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktek pengelolaan keuangan modern di sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan tentang biaya dan juga dapat meningkatkan kualitas.

Menurut Mardiasmo (2004:2001), menyebutkan salah satu dimensi dari akuntabilitas adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Maka dari itu dalam proses penatausahaan BMN/BMD perlu adanya integritas dan kejujuran dalam pelaksanaannya tentang akuntansi barang milik negara untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan laporan yang tidak benar.

1. Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN menyatakan bahwa ruang lingkup penatausahaan barang milik negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Barang Milik Negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusman (2017) bahwa terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Pembukuan Barang Milik Negara;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 84 menjelaskan bahwa Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/ Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, Pembukuan dimaksudkan agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan barang tercatat dengan baik. Tujuan dilakukannya pembukuan adalah tersedianya data BMN yang baik, dan terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, serta optimal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pembukuan, meliputi : pencatatan semua BMN, mutasi BMN, hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, menyusun daftar barang yang datanya berasal dari Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, mencatat perubahan atas perpindahan dan perubahan kondisi barang, melakukan penghapusan atas barang rusak berat dan barang hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap barang hilang yang ditemukan kembali.

3. Inventarisasi Barang Milik Negara;

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan sensus pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola. Tujuan inventarisasi adalah tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Pelaksanaan inventarisasi, meliputi : pemberian label nomor dan nama ruangan pada denah lokasi, pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, mencatat hasil inventarisasi ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi, mengelompokkan dan memberi kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang, menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi, menyampaikan laporan hasil inventarisasi, serta memperbaharui hasil inventarisasi.

Doli D. Siregar (2004) menyatakan inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yudiris/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi/volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yudiris merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Adapun proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/ labelling, pengelompokan, dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Sugiana (2013) menyebutkan inventarisasi aset diharapkan dilakukan secara efektif agar (1) tertib administrasi, (2) pengamanan aset, (3) pengendalian dan pengawasan aset dapat terwujud.

4. Pelaporan Barang Milik Negara;

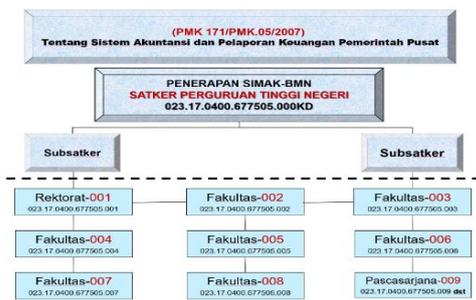
Menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pelaksanaan pembukuan meliputi : penyampaian Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Wilayah dan Eselon I, menyusun dan menyampaikan Daftar Barang Rusak Berat dan Daftar Barang Hilang, menyampaikan mutasi BMN pada Daftar Barang Kuasa Pengguna, menyampaikan laporan hasil inventarisasi, laporan barang kuasa pengguna, dan laporan kondisi barang secara periodik.

5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

Menurut lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada bagian keempat menyebutkan bahwa SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. SIMAK BMN diselenggarakan oleh unit dengan prinsip-prinsip ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan.



Gambar 1: Struktur persiapan Satker/Subsatker



Gambar 2 : Penerapan SIMAK BMN

Dalam rangka percepatan penyelesaian penatausahaan dan pengelolaan BMN di satuan kerja maka diperlukan penerapan SIMAK BMN untuk membantu mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN seperti Gambar 1 Struktur SIMAK BMN Satker dan Subsatker di atas.:

Penjelasan Gambar 1 dan 2 adalah proses persiapan sebelum Setup Installan sistem SIMAK BMN dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan pemetaan pembagian lokasi atau unit kerja sesuai keberadaan aset tersebut berada sebagai UAKPB/Satker/maupun sebagai Subsatker hingga selesai penerapan SIMAK BMN sebagai Satker maupun Subsatker.



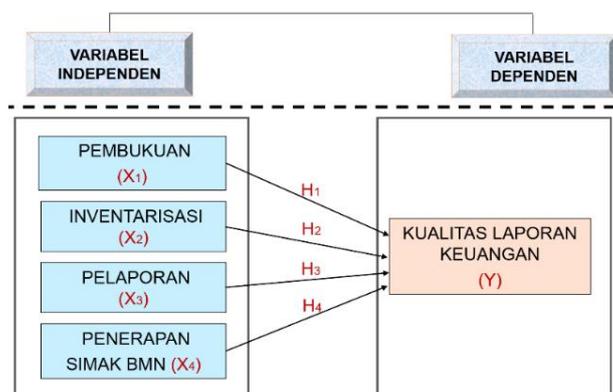
Gambar 3 : Integrasi data SIMAK BMN dan SAIBA pada aplikasi e-Rekon/LK

Penjelasan Gambar 3 selanjutnya hasil validasi data SIMAK BMN dan data keuangan SAIBA dalam pengelolaan akuntansi aset dan akuntansi keuangan di lingkungan satuan kerja perguruan tinggi negeri Kemendikbudristek Wilayah Yogyakarta harus terintegrasi pada Laporan Keuangan Kementerian (LKL) melalui aplikasi e-Rekon/LK berbasis web dari Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Menurut (Doli D.Siregar, 2004: 561) yang menyatakan bahwa empat tahapan kerja manajemen aset yakni inventarisasi aset, *legal audit*, optimalisasi aset, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) saling berhubungan dan terintegrasi.

Selanjutnya Mahsun dkk. (2011:178) SIMAK BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan

neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LMBN) serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kerangka penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Variabel Independen Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerapan SIMAK BMN terhadap Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan, seperti pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4: Kerangka Penelitian

Penjelasan Gambar 4 hubungan pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel X dan Y meliputi;

1. Jika Variabel Pembukuan (X_1) dilaksanakan baik sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
2. Jika Variabel Inventarisasi (X_2) dilaksanakan baik sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
3. Jika Variabel Pelaporan (X_3) dilaksanakan baik sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
4. Jika Variabel Penerapan SIMAK BMN (X_4) dilaksanakan baik sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Sehingga secara simultan atau bersama-sama, jika pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, dan Penerapan SIMAK BMN, maka akan berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan yang semakin baik/tinggi.

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesa dalam penelitian ini dirumuskan menjadi empat hipotesa, antara lain:

1. Pengaruh Pembukuan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 84 menjelaskan bahwa tujuan Pembukuan adalah untuk tersedianya informasi data BMN yang baik, dan terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, serta optimal dalam memberikan informasi penyusunan laporan keuangan. Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Pembukuan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H_1 : Pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Inventarisasi BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN dalam menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang secara akurat.

Menurut Doli D. Siregar (2004) menyatakan inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yudiris/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi/volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yudiris merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain akan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan aset.

Menurut penelitian Sugiyama (2013) menyebutkan inventarisasi aset diharapkan

dilakukan secara efektif agar (1) tertib administrasi, (2) pengamanan aset, (3) pengendalian dan pengawasan aset dapat terwujud memberikan akuntabilitas laporan keuangan. Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Inventarisasi BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₂ : Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Pengaruh Pelaporan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan/atau entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dan dapat dipahami oleh pengguna. Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Pelaporan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₃ : Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pengaruh Penerapan SIMAK BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 menyebutkan bahwa SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi untuk unit satuan kerja dengan prinsip ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan.

Menurut (Doli D.Siregar, 2004: 561) yang menyatakan bahwa empat tahapan kerja manajemen aset yakni inventarisasi aset, *legal audit*, optimalisasi aset, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) saling berhubungan dan terintegrasi.

Selanjutnya penelitian Mahsun dkk. (2011:178) menjelaskan bahwa SIMAK BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LMBN) serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Penerapan SIMAK BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₄ : Penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/petugas yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi aset dan akuntansi keuangan yang selama ini bekerja pada satuan kerja perguruan tinggi negeri Wilayah Yogyakarta, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner, dan populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang/kuesioner para petugas/pegawai yang selama ini menangani akuntansi aset dan akuntansi keuangan yang bekerja pada 3 (tiga) satuan kerja masing-masing 15 orang/satuan kerja perguruan tinggi negeri diwilayah Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesa yang diajukan dengan menggunakan metode penelitian yang telah dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:2009), penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dari objek atau keseluruhan subjek yang hendak diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan reliabilitas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan

analisis deskriptif. Kedua pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan yang diajukan dalam kuesioner layak untuk diajukan dan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas tidak ada pernyataan yang harus dihilangkan, semua pernyataan dalam indikator pada variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN, dan kualitas laporan keuangan dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat melakukan analisis deskriptif yang hasilnya ada dalam Tabel 2. Menunjukkan kuesioner yang telah dikumpulkan sebanyak 45 responden, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif jawaban responden

Variabel	Rata-rata					Total
	STS	TS	N	S	SS	
	1	2	3	4	5	
Pembukuan	0	1	7	28	9	45
Inventarisasi	0	2	6	26	11	45
Pelaporan	0	1	5	27	12	45
Penerapan SIMAK BMN	0	2	5	29	9	45
Kualitas Laporan Keuangan	0	2	5	30	8	45
Jumlah	0	8	28	140	49	225
Total (skor x jumlah)	0	16	84	560	245	905
%	0,00%	1,77%	9,28%	61,88%	27,07%	100%

Sumber: Data primer hasil olahan 2020

Tabel 2. menunjukkan frekuensi pilihan jawaban empat atau setuju (S) sebesar 560 (61,88%), kemudian diikuti pilihan jawaban lima atau sangat setuju (SS) sebesar 245 (27,07%), pilihan jawaban tiga atau netral (N) sebesar 84 (9,28%), pilihan jawaban dua atau tidak setuju (TS) sebesar 16 (1,77%) dan terakhir pilihan jawaban satu atau sangat tidak setuju (STS) sebesar 0 (0,00%).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju (S) dalam menjawab pernyataan pada variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN dan kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, hal ini membuktikan telah berada pada kategori baik atau tinggi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni normalitas ketiga variabel tersebut berdistribusi normal yakni sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,053. Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10 artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variable. Berdasarkan uji heteroskedastisitas pola yang dihasilkan menyebar baik dibawah angka 0 maupun sumbu Y ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Selanjutnya hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.643 + 0.980 X_1 + 0.239 X_2 + 0.149 X_3 + 0.138 X_4 + e$$

Adapun ringkasan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Beta	Thitung	Sig.t
Konstanta	2,643	0,685	0,495
Pembukuan BMN	0,980	5,585	0,000
Inventarisasi BMN	0,239	1,220	0,230
Pelaporan BMN	0,149	0,684	0,482
Penerapan SIMAK BMN	0,138	0,602	0,550
Asymp.Sig (2-tailed)		0,237	
R (korelasi)		0,652	
Adjusted R Square		0,629	
F hitung		19,914	
Sig. F		0	
Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan			

Sumber : Data Primer yang telah diolah SPSS (2020)

Penjelasan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *output* pada Tabel 3, diperoleh nilai F hitung sebesar 19.914 Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 yaitu sebesar 4, dan df 2 (n-k-1) atau 45- 4-1 yaitu sebesar 40, maka diperoleh F tabel sebesar 2,61. Karena F hitung > F tabel, maka $H_0,1$ ditolak dan $H_a,1$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, dan Penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang artinya semakin baik pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan optimal sebagaimana dalam Tabel 4. penjelesan dari hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait Variabel Pembukuan (X_1) dimana skor rata-rata persentase sebesar 62,22% menyetujui (S) pernyataan yang dipaparkan, dapat diartikan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta sudah cukup tinggi atau baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata									
	STS		TS		N		S		SS	
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Pembukuan	0	0,00%	1	2,22%	7	15,56%	28	62,22%	9	20,00%
Inventarisasi	0	0,00%	2	4,44%	6	13,33%	26	57,78%	11	24,44%
Pelaporan	0	0,00%	1	2,22%	5	11,11%	27	60,00%	12	26,67%
Penerapan SIMAK BMN	0	0,00%	2	4,44%	5	11,11%	29	64,44%	9	20,00%
Kualitas Laporan Keuangan	0	0,00%	2	4,44%	5	11,11%	30	66,67%	8	17,78%
Jumlah	0		8		28		140		49	
Total (skor x jumlah)	0		16		84		560		245	
%	0,00%		1,77%		9,28%		61,88%		27,07%	

Sumber: Data primer hasil olahan 2020

Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Inventarisasi BMN (X_2) sebesar 57,78% yang artinya inventarisasi yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Pelaporan BMN (X_3) sebesar 60,00% yang artinya pelaporan yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai penerapan SIMAK BMN (X_4) sebesar 64,44% yang artinya penerapan SIMAK BMN yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada dalam kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan (X_5) sebesar 66,67% yang artinya penyusunan Kualitas Laporan Keuangan yang dilakukan petugas akuntansi BMN juga berada dalam kategori tinggi atau baik.

Penjelasan Pembukuan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel pembukuan BMN (X_1) sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_0,2$ ditolak dan H_2 diterima, hal ini berarti pembukuan BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju (S) rata-rata sebesar 62,22% terhadap pernyataan para petugas akuntansi BMN telah mencatat semua data sumber BMN ke dalam SIMAK BMN, dari tertib administrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN satker perguruan tinggi negeri Wilayah Yogyakarta sudah cukup baik atau tinggi.

Penjelasan Inventarisasi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel inventarisasi BMN (X_2) sebesar 0,230 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,3}$ ditolak dan $H_{0,3}$ diterima, hal ini berarti Inventarisasi BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan Inventaris, maka kualitas

laporan keuangan semakin baik.

Berdasarkan hasil tanggapan rata-rata responden terhadap variabel Inventarisasi, dapat dilihat bahwa 57,78% menyetujui (S) pernyataan yang dipaparkan, artinya Inventarisasi BMN pada satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan penyampaian sangat setuju (SS) laporan hasil inventarisasi sebesar 24,44% nilai ini termasuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik. Kemudian hasil tertiggi lainnya berasal dari tanggapan responden terhadap pernyataan pencatatan hasil inventarisasi ke dalam kertas kerja hasil inventarisasi dan pelaksanaan sensus barang milik negara. Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator pertama, yaitu pemberian nomor dan nama ruangan sebanyak 4,44% petugas akuntansi BMN memberikan tanggapan tidak setuju karena indikator pada variabel ini saling terkait dengan indikator selanjutnya maka ditemukan pula responden yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk ke-enam indikator lainnya.

Meskipun demikian, persentase tanggapan responden pada indikator pencatatan hasil inventarisasi berada pada kategori sangat baik yaitu pencatatan hasil inventarisasi ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi (KKI). Hal ini mungkin saja terjadi karena pencatatan hasil inventarisasi bisa saja berasal dari dokumen sumber terkait pencatatan mutasi BMN pada proses pembukuan, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen kepemilikan, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan dokumen sumber terkait lainnya.

Penjelasan Pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat sigifikansi variabel pelaporan BMN (X_3) sebesar 0,492 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,4}$ ditolak dan $H_{0,4}$ diterima, hal ini berarti penyusunan Pelaporan BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan penyusunan Pelaporan tepat waktu, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Hasil pengujian statistik deskriptif mengenai pelaporan menunjukkan skor rata-rata persentase tanggapan menyetujui (S) responden pada satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori tinggi, dikatakan demikian karena pada indikator penyampaian Pelaporan Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Rusak Berat, Daftar Barang Hilang, mutasi, Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Kondisi Barang mendapat persentase sebesar 60.00%. Berdasarkan statistik deskriptif, mayoritas hasil dari jawaban responden menyatakan bahwa pelaporan telah memiliki hasil yang baik. Tetapi walaupun pelaporan berada pada kategori baik, namun jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun pada variabel pelaporan masih ada responden sebesar 2,22% yang memberikan tanggapan tidak setuju.

Penjelasan Penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat sigifikansi penerapan SIMAK BMN (X_4) sebesar 0,550 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,6}$ ditolak dan $H_{0,5}$ diterima, hal ini berarti Penerapan SIMAK BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan Penerapan SIMAK BMN, maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Berdasarkan hasil tanggapan rata-rata responden terhadap variabel Penerapan SIMAK BMN, dapat dilihat bahwa sebesar 64,44% menyetujui pernyataan yang dipaparkan, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIMAK BMN pada Satker Perguruan Tinggi Negeri berada pada kategori baik. Dari hasil tanggapan responden mayoritas petugas akuntansi BMN sudah melakukan penerapan SIMAK BMN dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN, yakni ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan. Namun, pada indikator ketaatan, ditemukan 2 petugas akuntansi BMN atau 4,44% yang menjawab tidak setuju (TS) dan 5 petugas akuntansi BMN atau 11,11% yang memberikan jawaban netral yang artinya masih ada petugas akuntansi BMN yang tidak melaksanakan penerapan SIMAK BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun begitu, kualitas laporan keuangan berada pada kategori baik, indikator lengkap pada variabel kualitas laporan keuangan mendapat persentase 66,67% yang artinya berada pada kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kenyataannya, seluruh satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta telah melaksanakan penerapan SIMAK BMN sebagai Satker maupun Subsatker, sehingga petugas akuntansi BMN pada beberapa Subsatker PTN sudah memahami prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN dan sepenuhnya memanfaatkan sistem tersebut sebagai alat digunakan untuk membantu proses pencatatan sumber data BMN mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi barang milik negara yang akurat.

Indikator yang menjadi penguat efektivitas pengaruh Penatausahaan dan penerapan SIMAK-BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah opini atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, bahwa Penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK-BMN menjadi salah satu sumber utama dalam penyusunan neraca laporan keuangan secara berjenjang mulai tingkat UAKPB atau Satuan Kerja sampai tingkat UAPB atau Kementerian. Semakin banyak Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP, berarti semakin efektif informasi yang disajikan dari hasil Penatausahaan dan penerapan SIMAK-BMN mulai dari tingkat Satuan kerja. Berikut daftar perkembangan opini laporan keuangan Kementerian periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Opini hasil LHP BPK RI tahun 2016-2020

No	BA	Kementerian	Opini BPK RI atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP BPK RI atas LKKL Tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penatausahaan, dan penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengujian hipotesis parsial, diperoleh bahwa :
 - a. Variabel Pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan aset tetap kedalam daftar barang inventaris serta memberikan kemudahan akses bagi para pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik negara tahun anggaran berikutnya, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.
 - b. Variabel Inventarisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Hal ini dikarenakan kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagai entitas satuan kerja.
 - c. Variabel Pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Hal ini menunjukkan bahwa dengan proses pelaporan yang tepat waktu dan sesuai asas kepatuhan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
 - d. Variabel Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan dengan dilakukan penerapan SIMAK BMN akan sangat membantu mempercepat proses penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara berdasarkan akuntansi berbasis akrual sesuai peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
- 2) Berdasarkan pengujian hipotesis simultan, diperoleh bahwa Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Secara deskriptif diperoleh gambaran bahwa penatausahaan meliputi Pembukuan,

Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN pada satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulkan dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini antara lain:

1. Akuntabilitas laporan keuangan satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta harus dilakukan sebaik mungkin, khususnya dalam implementasi penatausahaan BMN dan penerapan SIMAK BMN diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional, dengan mengadakan pelatihan pemutahiran SIMAK BMN dan Penatausahaan BMN yang selalu berkembang bagi pegawai/petugas akuntansi aset.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan BMN seperti Penilaian aset, Optimalisasi aset tetap, Legal audit, serta Pengawasan dan Pengendalian, sehingga dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas nilai neraca dari varians yang dijelaskan.
3. Pada peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner, namun setelah masalah pandemi covid-19 ini sebaiknya disertai interview dengan pegawai pengurus barang terkait

DAFTAR RUJUKAN

- Amiri, Kartika. (2015). *Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Akuntabel Menuju Good Governance*.
- Doli D. Siregar 2004, *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo (2004:2001), *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Moh., Purwangkara, H.S., dan Sulistyono, F. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)* Yogyakarta: BFE.
- Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 13(2): 45–56.
- Novira, J., Dini, W.H., & Muhamad, M. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang perubahan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI.Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta.

Rusman. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh) Vol 8 No.1 Jurnal

Sugiana, A. G. (2013). Manajemen aset pariwisata: Pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal. Bandung: Guardaya Intimarta.

Sugiyono, (2013:2009), "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D", Penerbit CVAlfa Beta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Van Der Hoek, M.P. (2005), From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in The Public Sector: The Dutch Experience. Public Budgeting and Finance.